

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF REGION EXPENSE CAPABILITY WHICH IS FINANCED BY REGION INNATE INCOME (PAD) AND PROFIT SHARING FUND (DANA BAGI HASIL) IN SOUTH LAMPUNG REGENCY 2004 – 2010

By

Zobi Harika

Since Constitution No. 33 of 2004 (*UU No. 33 Tahun 2004*) about Region Financial has been applied, it is brings a great and fundamental effect of the relationship between the central government and regional government in the form of financial system which is arranged based on division of authority, task, and distict responsibility among government levels. The income sources of region financial in South Lampung Regency were come from Region Innate Income (*PAD*), and Equalization Fund (*Dana Perimbangan*) which consists of Funds for Tax Returns (*Dana Bagi Hasil Pajak*), Profit Sharing Fund of Natural Resources (*Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*), Public Allocation Fund (*DAU*), and Particular Allocation Fund (*DAK*).

The reflection of region financial management and region development financing could be seen clearly in Income and Expenditure Budget of the Region (*APBD*) that has widely implication. Regarding to both components that has been mentioned above, we can get conclusion that those components will largely determine the financial position of local government in order to carry out regional autonomy. Region financial capability of South Lampung Regency extremely depends on The Equalization Fund of the Central Government (*Dana Perimbangan Pemerintah Pusat*).

This research use to explores the impact of financing source which comes from Fund For Tax Returns (*Dana Bagi Hasil Pajak*), Profit Sharing Fund of Natural Resources (*Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*), and Region Innate Income (*PAD*) toward region expense capability in South Lampung Regency during 2004 - 2010.

Based on the result of analysis, indicates that contribution of Region Innate Income (*PAD*) and Profit Sharing Fund both Taxes and Natural Resources toward

region expense of South Lampung Regency relatively remains very small. The government of South Lampung Regency having more in funding the region financing from Public Allocation Funds (*DAU*) of central government. This fact indicates that the government of South Lampung Regency highly depends on central government during the year of 2004 – 2010.

Key Words: Region Financial, Region Innate Income (*PAD*), Profit Sharing Fund

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN BELANJA DAERAH YANG DI BIAYAI OLEH PAD DAN DANA BAGI HASIL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2004 - 2010

Oleh

Zobi Harika

Didalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah sejak diberlakukannya, membawa dampak yang besar dan mendasar dalam hubungan antara keuangan pusat daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintah. Sebagai sumber penerimaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan antara lain dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK.

Refleksi dari pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah dapat dengan jelas dilihat dan tergambar pada APBD yang mempunyai implikasi yang sangat luas. Dari kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan sangat tergantung dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak sumber pembiayaan dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan PAD terhadap kemampuan Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Selatan 2004 -2010.

Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan sumbangan PAD dan Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam terhadap belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan relatif masih sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan lebih banyak membiayai belanja daerah dari alokasi DAU pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap pusat selama tahun 2004 -2010 masih tinggi.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah